

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KEKAYAAN
PEMERINTAH DAERAH, DAN JUMLAH PENDUDUK
TERHADAP PENGUNGKAPAN *INTERNET*
*BUDGETING REPORTING***
(Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera)

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

DEKA ANUGRAH HADI
2015/15043005

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KEKAYAAN
PEMERINTAH DAERAH, DAN JUMLAH PENDUDUK
TERHADAP PENGUNGKAPAN *INTERNET*
BUDGETING REPORTING
(Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera)**

Nama : Deka Anugrah Hadi
NIM/TM : 15043005/2015
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, 17 Februari 2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing



Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si
NIP. 19880507 201404 2 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Sany Dwita, SE, M.Si, PhD, Ak. CA
NIP. 19800103 200212 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah, dan Jumlah Penduduk terhadap Pengungkapan *Internet Budgeting Reporting* (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera)

Nama : Deka Anugrah Hadi

NIM/TM : 15043005/2015

Program Studi : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, 17 Februari 2020

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si	1. 
2	Anggota	Vanica Serly, SE, M.Si	2. 
3	Anggota	Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deka Anugrah Hadi
NIM/Tahun Masuk : 15043005/2015
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Penuh/ 17 Desember 1997
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan Kalpataru No. 8 Koto Tengah
No. HP/Telp : 081373236864/-
Judul Skripsi : Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah, dan Jumlah Penduduk terhadap Pengungkapan *Internet Budgeting Reporting* (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 20 Februari 2020

Yang Menyatakan


Deka Anugrah Hadi
15043005/2015

ABSTRAK

Deka Anugrah Hadi, 15043005/2015

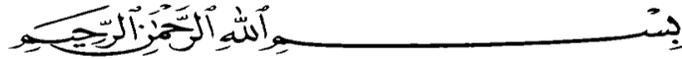
“Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah Dan Jumlah Penduduk terhadap Pengungkapan *Internet Budgeting Reporting* (Studi Empiris Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera)”

Pembimbing : Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si

This study aims to determine the effect of local government size, local government wealth, and population on internet budgeting reporting. The samples in this study were district / city governments on the island of Sumatra which published 2016 and 2017 Local Government Financial Statements, which were audited by BPK RI and presented the data and information needed for measurement of research variables, and district / city governments that has an official website for public access. The sampling technique was purposive sampling. A total of 154 districts / cities were used as sampled in this study and processed by using multiple linear regression techniques. The study results indicate that the local government size has a positive and significant effect on internet budgeting reporting. Local government wealth does not significantly influence internet budgeting reporting. The population also does not have a significant effect on internet budgeting reporting.

Keywords : Local government size, local government wealth, population, internet budgeting reporting.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ **Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah, dan Jumlah Penduduk terhadap Pengungkapan *Internet Budgeting Reporting* (Studi Empiris Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera)**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Vanica Serly, SE, M.Si selaku dosen penela`ah dan selaku penguji yang telah memberikan banyak saran dan perbaikan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku penguji yang telah memberikan banyak saran dan perbaikan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Bapak Dr. Idris, M.Si serta para wakil dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, PhD, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku Dosen Penasehat Akademik (PA).
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis melakukan perkuliahan.
8. Teristimewa penulis ucapkan kepada kedua orang tua (Alm. Ayah Januardi dan Ibu Nurhaizan) tercinta, saudaraku (Diki dan Puji) dan keluarga besar yang telah memberikan kesungguhan do'a, bantuan moril dan materil kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Teman-teman Jurusan Akuntansi 2015 yang telah banyak memberikan semangat dan bantuan kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih ada kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis.

Padang, Februari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS	11
A. Kajian Teori	11
1. Teori <i>Stakeholder (Stakeholder Theory)</i>	11
2. Teori Sinyal (<i>Signaling Theory</i>).....	13
3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	15
4. <i>Internet Budgeting Reporting</i>	24
5. Ukuran Pemerintah Daerah	29
6. Kekayaan Pemerintah Daerah	31
7. Jumlah Penduduk.....	32
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan	33
C. Hubungan Antar Variabel.....	37

1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap <i>Internet Budgeting Reporting</i>	38
2. Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap <i>Internet Budgeting Reporting</i>	39
3. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap <i>Internet Budgeting Reporting</i>	41
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Populasi dan Sampel.....	44
1. Populasi	44
2. Sampel.....	45
C. Jenis dan Sumber Data.....	48
1. Jenis Data.....	48
2. Sumber Data	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Variabel Penelitian dan Pengukuran	50
1. Variabel Dependen	51
2. Variabel Independen.....	52
F. Teknik Analisis Data.....	53
1. Analisis Deskriptif.....	53
2. Metode Analisis.....	53
a. Uji Asumsi Klasik	53
b. Analisis Regresi Berganda	56
c. Uji Model.....	57
G. Definisi Operasional	58
1. <i>Internet Budgeting Reporting</i>	58
2. Ukuran Pemerintah Daerah	59
3. Kekayaan Pemerintah Daerah	59

4. Jumlah Penduduk.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Deskripsi Variabel Penelitian.....	61
B. Hasil Pengujian	66
1. Uji Asumsi Klasik	66
2. Analisis Regresi Linear Berganda	72
3. Uji Hipotesis Penelitian.....	74
4. Analisis Koefisien Determinasi.....	76
C. Pembahasan.....	79
1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap <i>Internet Budgeting Reporting</i>	80
2. Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap <i>Internet Budgeting Reporting</i>	82
3. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap <i>Internet Budgeting Reporting</i>	85
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Implikasi Penelitian	88
C. Keterbatasan Penelitian.....	89
D. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.1 Perhitungan Sampel Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.....	46
Tabel 3.2 Daftar Sampel Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.....	46
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Data Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun 2016	61
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Data Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun 2017	63
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas	69
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi	71
Tabel 4.5 Regresi Linier Berganda	72
Tabel 4.6 Hasil Statistik Uji t.....	75
Tabel 4.7 Koefisien Determinasi	77
Tabel 4.8 Korelasi Antara Ukuran Pemda, Kekayaan Pemda, Jumlah Penduduk Dengan <i>Internet Budgeting Reporting</i>	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	43
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas	67
Gambar 4.2 Scatterplot Data.....	70
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian.....	95
Lampiran 2 Statistik Deskriptif.....	104
Lampiran 3 Uji Normalitas	105
Lampiran 4 Uji Multikolinearitas	106
Lampiran 5 Uji Heteroskedastisitas	107
Lampiran 6 Uji Autokorelasi	108
Lampiran 7 Regresi Berganda.....	110
Lampiran 8 Korelasi Parsial.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Implementasi e-government yang dilakukan Pemerintah Daerah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 dalam hal penyajian informasi, saat ini dinilai masih banyak kekurangan. Pada dasarnya informasi dasar sudah ada pada semua website pemerintah daerah. Akan tetapi ada persoalan pada fase interaksi dengan tampilan informasi yang harus dibagikan pada publik. Pada fase ini masih terdapat banyak pemerintah daerah yang tidak menyajikan informasi keuangan di situs daerah yang bersangkutan. Meskipun sebagian besar website pemerintah daerah mencantumkan link untuk mengunduh informasi keuangan dan kinerja pemerintah daerah tetapi masih banyak yang hanya berbentuk halaman kosong (Cheisviyanny, 2018).

Pentingnya pertanggungjawaban bagi pemerintah daerah adalah untuk transparansi pengelolaan di daerah agar dapat menghindari terjadinya kebocoran anggaran dari perencanaan yang tidak tepat. Dengan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah secara online, masyarakat dapat mengetahui tentang laporan kinerja yang berisi ringkasan informasi tentang input, proses, hasil dan keuntungan dari setiap kegiatan atau program yang dijalankan pemerintah daerah sehingga dapat digunakan untuk mengukur tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pelaporan keuangan melalui *internet* merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat. Akan tetapi sejauh ini pengungkapan tersebut lebih bersifat secara sukarela (*voluntary disclosure*) karena tidak ada sanksi yang diterapkan jika tidak dipenuhi (Nosihana & Yaya, 2016). Namun demikian, tidak semua pemerintah daerah yang secara sukarela memilih untuk mengambil manfaat dari *internet* sebagai media dalam melakukan pelaporan keuangan. Pada saat ini, terdapat faktor heterogenitas diantara pemerintah daerah di Indonesia dimana informasi akuntansi di *internet* diungkapkan secara bervariasi mulai dari yang paling sedikit hingga yang paling lengkap (Afryansyah & Haryanto, 2013). Hal inilah yang dapat menyebabkan perbedaan kualitas dan informasi keuangan antar pemerintah daerah.

Masyarakat sebagai *stakeholder* terbesar pemerintah pada dasarnya memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut. Peraturan perundang-undangan sudah menjamin hak masyarakat, salah satunya pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) harus disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronik. Kemudian juga dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan bahwa hak untuk mendapatkan informasi publik adalah hak asasi warga negara yang dilindungi

oleh Undang-Undang. Undang-Undang ini menganjurkan bahwa informasi-informasi lainnya yang wajar diketahui oleh publik sebaiknya diungkapkan.

Terkait dengan pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah, ada beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi *internet budgeting reporting* di Pemerintah Daerah. Faktor pertama yang diduga dapat mempengaruhi *internet budgeting reporting* adalah ukuran pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah adalah besarnya jumlah aset yang dimiliki oleh Pemda. Maka dari itu ukuran pemerintah daerah yang besar mengindikasikan terdapat jumlah aset yang besar, sehingga pengawasan dari masyarakat akan kegiatan pemerintah akan semakin ketat untuk mencegah penyelewengan dana yang dilakukan pemerintah. Adanya pengawasan yang ketat akan cenderung mendorong pemerintah daerah untuk mempublikasikan laporan keuangan secara transparan (Nosihana & Yaya, 2016).

Ukuran pemerintah daerah adalah salah satu variabel dalam besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang biasanya diukur dengan total aset. Pemerintah daerah dengan aset besar diasumsikan memiliki potensi untuk memberikan pelayanan yang lebih terhadap masyarakat. Tuntutan dalam kinerjanya secara otomatis akan meningkat sesuai dengan nilai aset yang dimiliki (Alvini, 2018). Rahman, dkk. (2013:10) menyatakan bahwa besarnya total aset mendorong pemerintah daerah untuk melakukan publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai cara untuk memberikan sinyal bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan kinerja pemerintahan dengan baik.

Faktor kedua adalah kekayaan pemerintah Daerah. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber kekayaan di daerahnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kekayaan (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (Alvini, 2018). Dengan pendapatan daerah yang besar, pemerintah daerah akan memberikan informasi yang positif dan transparan kepada masyarakat dan menunjukkan kemampuan Daerah dalam memaksimalkan potensi sumber daya di daerah tersebut.

Kekayaan (*wealth*) dari pemerintah daerah diprosikan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Setyaningrum, 2012:158). Halim (2012:101) menjelaskan mengenai Pendapatan Asli Daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan tersebut bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya yang sah.

Faktor ketiga yang diduga dapat mempengaruhi *internet budgeting reporting* adalah jumlah penduduk. Sesuai dengan *Stakeholder Theory*, penduduk merupakan salah satu *Stakeholder* terpenting Pemerintah Daerah. Besarnya

jumlah penduduk mencerminkan besarnya kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap daerah. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin besar tuntutan akan pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintahnya mengingat fungsi Pemerintah sebagai abdi masyarakat (Pandansari, 2016).

Lembaga Badan Pusat Statistik menjabarkan bahwa penduduk adalah mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulan atau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap (www.bps.go.id). Pujoalwanto (2014:106) menyatakan bahwa secara umum pertumbuhan penduduk terjadi karena pertumbuhan penduduk alami yaitu pertumbuhan penduduk yang diketahui dari perhitungan selisih dari jumlah kelahiran dan jumlah kematian.. Pertumbuhan penduduk total adalah jumlah dari seluruh faktor yang yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran, kematian migrasi serta emigrasi. Jadi untuk mengetahui pertumbuhan penduduk total adalah dengan cara menambah selisih dari jumlah kelahiran dan kematian dengan selisih jumlah dari imigrasi dengan emigrasi. Menurut Hendriyani & Tahar (2015), jumlah penduduk merupakan subuah pengukuran yang menggambarkan kompleksitas suatu daerah. Artinya semakin tinggi jumlah penduduk suatu daerah maka semakin kompleks pemerintahan tersebut sehingga semakin tinggi pula tingkat pengungkapan informasi yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetya & Irwandi (2012) meneliti ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, leverage, dan umur perusahaan terhadap

pelaporan keuangan melalui internet pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya variabel ukuran perusahaan yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaporan keuangan melalui internet. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nosihana & Yaya (2016) meneliti tentang kompetisi politik ukuran Pemda, rasio leverage, kekayaan Pemda, tipe Pemda, dan opini audit terhadap pelaporan keuangan melalui internet pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. Hasilnya menyimpulkan bahwa ukuran Pemda (SIZE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan di internet melalui *Egovernment*.

Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2015) pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2010-2013 menunjukkan bahwa kompleksitas pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah dan belanja daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Junaedi (2015) pada pemerintah daerah/kota di Indonesia, didapatkan hasil bahwa kekayaan daerah, kompleksitas daerah, tipe pemerintah daerah dan kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan berbasis internet pada pemerintah daerah, sedangkan ketergantungan daerah dan tingkat penyimpangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan berbasis internet pada pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Hendriyani & Tahar (2015) pada Pemerintah Provinsi di Indonesia, memperoleh kesimpulan bahwa tingkat ketergantungan daerah, belanja modal, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Penelitian lainnya Hilmi & Martani (2012) yang meneliti pada Pemerintah Provinsi di Indonesia menemukan bahwa kekayaan daerah dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Hal ini karena semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar dorongan masyarakat untuk meminta pengungkapan yang lebih besar dalam laporan keuangan pemerintah.

Dari beberapa penelitian terdahulu terlihat adanya perbedaan dalam penggunaan variabel dan hasil penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah, dan jumlah penduduk yang menandakan kompleksitas suatu daerah. Ketiga variabel ini akan diuji pengaruhnya terhadap pengungkapan laporan anggaran melalui internet atau *internet budgeting reporting*. Studi ini akan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera periode 2016 dan 2017. Peneliti memilih sampel Kabupaten/Kota Pulau Sumatera untuk mendapatkan hasil yang spesifik, karena aset dan jumlah penduduk bisa berbeda jauh dengan pulau-pulau lain.

Menurut penulis, penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan khususnya pemerintah daerah masih penting untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena pengungkapan dalam laporan

keuangan memberikan gambaran kondisi pemerintah daerah tersebut pada periode pelaporan. Publik juga akan mendapatkan akses untuk mengawasi pengelolaan keuangan pemerintah sebagai wujud demokrasi dalam menciptakan transparansi di pemerintah daerah.

Penulis memilih variabel ukuran pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah dan jumlah penduduk sebagai variabel yang diduga mempengaruhi pengungkapan *internet budgeting reporting* di situs pemerintah daerah. Hal ini didukung pada beberapa penelitian terdahulu dimana pemerintah daerah yang besar memiliki jumlah dan transfer kekayaan yang besar pula, sehingga pemerintah daerah akan mendapatkan pengawasan yang lebih besar. Kemudian yang kedua adalah kekayaan pemerintah daerah. Kekayaan yang besar cenderung rentan terhadap penyalahgunaan. Hal inilah yang mendorong masyarakat selaku *principal*, menjadi lebih tertarik dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah dan menuntut transparansi atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Ketiga adalah jumlah penduduk, artinya semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar dorongan dari masyarakat untuk meminta pengungkapan yang lebih besar dalam laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang faktor yang mempengaruhi pengungkapan dalam laporan keuangan berbasis *internet*, dan akan menyusun dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah

dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengungkapan *Internet Budgeting Reporting* (Studi Empiris Implementasi Instruksi Mendagri Tahun 2012 pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap *internet budgeting reporting* ?
2. Apakah kekayaan pemerintah daerah berpengaruh terhadap *internet budgeting reporting* ?
3. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap *internet budgeting reporting*?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap *internet budgeting reporting*.
2. Untuk mengetahui pengaruh kekayaan pemerintah daerah terhadap *internet budgeting reporting*.
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap *internet budgeting reporting*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat manfaat antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi peneliti tentang bagaimana pengaruh ukuran pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, dan jumlah penduduk terhadap *internet budgeting reporting* pada pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sumatera.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dengan adanya penelitian ini maka pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuan dan pelayanan informasi publik melalui *e-government*. Sehingga pemerintah daerah dapat mengembangkan *website* yang ada untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *internet budgeting reporting* pada *website* pemerintah daerah dan dapat menjadi referensi atau acuan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Teori *Stakeholder* (*Stakeholder Theory*)

Menurut Harahap (2002) dalam Hadi (2011:93) bahwa perusahaan tidak hanya sekedar bertanggung jawab terhadap para pemilik (*Shareholder*) sebagaimana terjadi selama ini, namun bergeser menjadi lebih luas yaitu pada ranah sosial kemasyarakatan (*stakeholder*), selanjutnya disebut tanggung jawab sosial (*social responsibility*). Fenomena seperti ini terjadi, karena adanya tuntutan dari masyarakat akibat *negative externalities* yang timbul serta ketimpangan sosial yang terjadi.

Adam C.H (2002) dalam Hadi (2011:95) menyatakan berdasarkan pada asumsi dasar *stakeholder theory* tersebut, perusahaan tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungan sosial (*social setting*) sekitarnya. Perusahaan perlu menjaga legitimasi *stakeholder* serta mendudukannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung dalam pencapaian tujuan perusahaan, yaitu usaha dan jaminan *going concern*.

Terkait dengan teori *stakeholder*, perusahaan hendaknya menjaga reputasinya yaitu dengan menggeser pola orientasi (tujuan) yang semula semata-mata di ukur dengan pengukuran ekonomi yang cenderung berorientasi pada *shareholder*, ke arah *stakeholder* yaitu memperhitungkan

faktor sosial (*social factors*) sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan terhadap masalah sosial kemasyarakatan.

Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komprehensif. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang berupa Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas, dan Neraca Daerah (Halim, 2012: 245).

Pelaporan keuangan melalui *internet* adalah salah satu cara untuk memberikan pertanggungjawaban kepada *stakeholder* (khususnya masyarakat) dengan biaya yang murah. Namun demikian, tidak semua pemerintah daerah yang secara sukarela memilih untuk mengambil manfaat dari *internet* sebagai media dalam melakukan pelaporan keuangan (Afryansyah & Haryanto, 2013)

Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar dituntut untuk melakukan transparansi atas pengelolaan keuangannya sebagai bentuk akuntabilitas publik melalui pengungkapan informasi yang lebih banyak dalam laporan keuangan (Setyaningrum, 2012:157). Sesuai dengan *Stakeholder Theory*, penduduk merupakan salah satu *stakeholder* terpenting Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah penduduk maka tekanan untuk meminta informasi dan pertanggungjawaban pemerintah daerah

untuk mengungkapkan LKPD yang telah diaudit kepada masyarakat juga semakin besar, mengingat fungsi pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat

2. Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori *signalling* menjelaskan bahwa pemerintah yang memiliki tanggung jawab dan amanah dalam membangun negara ini ke arah yang lebih maju ke depan ingin memberikan signal yang baik kepada masyarakat. Realisasinya yaitu dengan cara menyajikan laporan keuangan yang akurat, penyampaian informasi kinerja pemerintah selama ini tanpa menutupi apapun, peningkatan pelayanan masyarakat dan pengemasan prestasi dan kinerja keuangan yang simpel dan menarik dibaca oleh pengguna (Hilmi & Martani 2012).

Teori *signalling* menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanah dari rakyat berkeinginan menunjukkan *signal* kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar rakyat dapat terus mendukung pemerintah yang sedang berjalan sehingga pemerintahannya dapat berjalan dengan lancar. Kinerja pemerintahan yang baik perlu diinformasikan kepada rakyat, baik sebagai bentuk pertanggungjawaban maupun sebagai bentuk promosi untuk tujuan politik (Evans dalam Hendriyani & Tahar, 2015).

Kekayaan pemerintah daerah yang besar cenderung rentan terhadap penyalahgunaan. Hal inilah yang mendorong masyarakat selaku *principal*, menjadi lebih tertarik dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah dan menuntut transparansi atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Melalui publikasi laporan keuangan, pemerintah daerah dapat menyampaikan informasi keuangan secara lebih lengkap dengan biaya yang lebih murah, sehingga dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara pemerintah daerah dan masyarakat (Pratama, 2015).

Pemerintah daerah dengan Pendapatan Asli Daerah yang besar dituntut untuk lebih baik dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan yang dimiliki demi pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah yang memiliki kinerja yang buruk akan menghindari pengungkapan sukarela dan akan lebih memilih untuk membatasi akses informasi kepada masyarakat. Pemerintah Daerah yang berkinerja baik akan mengungkapkan informasi lebih banyak dan menggunakan teknik pengungkapan yang lebih baik sesuai dengan teori *signalling*. Publikasi laporan keuangan pada *website* dapat menyampaikan hasil kerjanya dengan mudah dan murah (Trisnawati & Achmad, 2014).

Pengungkapan informasi keuangan yang disajikan secara lengkap menunjukkan inisiatif bagi Pemerintah Daerah tersebut untuk lebih transparan dalam pengelolaan pemerintahannya yang akan berujung balasan *signal* yang baik dari masyarakat yang akan terus mendukung pemerintah untuk terus

berkembang dan lebih optimal dalam membangun negara (Nosihana & Yaya 2016).

3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan menurut Kasmir (2013:7) adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Sedangkan menurut Mulyadi (2013:143) bahwa laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi keuangan sebagai dasar pembuatan keputusan.

Adapun pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, pengertian laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka laporan keuangan pemerintah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama suatu periode dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat

atas pengelolaan dana publik dan bermanfaat untuk penyajian informasi sebagai dasar pengambilan keputusan.

b. Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pada dasarnya, laporan keuangan pemerintah sudah seharusnya menyajikan informasi yang benar, informatif dan bermanfaat bagi para penggunanya. Adapun tujuan pelaporan keuangan menurut Mursyidi (2013:45) antara lain:

- 1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Menyediakan informasi jumlah sumber daya ekonomi yang dipakai pada kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang dicapai.
- 4) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

- 5) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan

Menurut Sujarweni (2015:89) tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah sebagai berikut :

- 1) Kepatuhan dan Pengelolaan

Laporan keuangan dapat memberikan jaminan bagi pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

- 2) Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

- 3) Perencanaan dan Informasi Otorisasi

Laporan keuangan memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan memberikan informasi-informasi pendukung mengenai otoritas penggunaan dana.

- 4) Kelangsungan Operasi

Laporan keuangan digunakan untuk membantu pembaca dalam menentukan bahwa unit kerja dapat meneruskan dalam menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

5) Hubungan Masyarakat

Laporan keuangan dapat memberi kesempatan kepada organisasi untuk mengajukan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada masyarakat. Selain itu juga berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6) Sumber fakta dan gambaran

Laporan keuangan dapat memberikan informasi berbagai kelompok yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

c. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Komponen laporan keuangan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

1). Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Berikut penjelasan masing-masing unsur sebagai berikut :

- a). Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- b). Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c). Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dari dana bagi hasil.
- d). Pembiayaan (*financing*). Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi.

2). Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

3). Neraca

Unsur dicakup oleh neraca terdiri dari:

- a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

b) Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

c) Ekuitas

4). Laporan Operasional (LO)

Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan LO, beban, transfer dan pos luar biasa

5). Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.

6). Laporan Perubahan Ekuitas

7). Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

d. Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan menurut Deddi Nordiawan (2010:44) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Laporan keuangan pemerintah daerah akan menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah tersebut dalam menjalankan aktivitas terkait pengelolaan dana. Apabila laporan keuangan pemerintah daerah berkualitas baik maka dapat dikatakan bahwa instansi pemerintah daerah telah berhasil dalam menjalankan kegiatannya.

Menurut Mahmudi (2016:11) pemerintah daerah harus terus berupaya memperbaiki kualitas laporan keuangan yang disajikan. Laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Relevan. Artinya informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan. Relevansi laporan keuangan terkait dengan:
 - a) Laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk memprediksi (*prediktive value*), yaitu memprediksi kondisi keuangan, kebutuhan keuangan, dan kinerja di masa datang.

- b) Laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk evaluasi kinerja masa lalu dan memberikan umpan balik dalam rangka perencanaan keuangan dan perbaikan kinerja di masa datang (*feedback value*).
 - c) Laporan keuangan dipublikasikan tepat waktu (*timeliness*). Laporan keuangan yang baik harus disajikan tepat waktu, sebab nilai atau manfaat suatu informasi akan berkurang jika terlambat disampaikan.
- 2) Andal (*Reliability*). Artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesatkan dan mengandung unsur manipulasi. Laporan keuangan yang andal memiliki ciri sebagai berikut:
- a) Disajikan secara jujur (*faithfulness of presentation*), yaitu laporan keuangan terbebas dari salah saji material dan tidak ada manipulasi laporan keuangan.
 - b) Dapat diverifikasi (*verifiability*), yaitu informasi dalam laporan keuangan dapat diverifikasi kebenarannya melalui proses audit laporan keuangan.
 - c) Netral dalam penyajian (*neutrality*), yaitu penyajian laporan keuangan tidak bersifat tendensius dan bias terhadap kepentingan kelompok tertentu.

- 3) Dapat dibandingkan (*comparability*), artinya laporan keuangan dapat digunakan sebagai perbandingan kinerja masa lalu atau perbandingan kinerja organisasi lain yang sejenis.
- 4) Dapat dipahami (*understandability*), artinya laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan.

Sedangkan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

A. Relevan

Laporan keuangan relevan apabila informasi yang dimuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

B. Andal

Informasi laporan keuangan bebas dari laporan keuangan yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

C. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

D. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang sesuai dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan yang dilakukan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

4. *Internet Budgeting Reporting*

a. *Pengertian Internet Budgeting Reporting*

Kemampuan internet yang ada saat ini telah mengembangkan pola layanan informasi publik secara tradisional menjadi model baru melalui sistem *e-Government* yang lebih efisien dan fleksibel karena pengaksesannya

bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun oleh masyarakat. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan transparansi kepada masyarakat (Nosihana & Yaya, 2016).

Publikasi laporan keuangan pemerintah melalui e-Government merupakan salah satu bentuk bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat. Akan tetapi sejauh ini pengungkapan tersebut lebih bersifat secara sukarela (*voluntary disclosure*) karena tidak ada sanksi yang diterapkan jika tidak dipenuhi (Nosihana & Yaya, 2016). Pelaporan keuangan melalui *internet* adalah pengembangan terbaru dari teknologi *internet* yang merupakan bentuk informasi laporan keuangan yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan media *internet*, yaitu melalui *website* pribadi yang dimiliki perusahaan (Prasetya dan Irwandi, 2012).

Pelaporan keuangan melalui *internet* adalah salah satu cara untuk memberikan pertanggungjawaban kepada *stakeholder* (khususnya masyarakat) dengan biaya yang murah. Namun demikian, tidak semua pemerintah daerah yang secara sukarela memilih untuk mengambil manfaat dari *internet* sebagai media dalam melakukan pelaporan keuangan. Pada saat ini, terdapat faktor heterogenitas diantara pemerintah daerah di Indonesia dimana informasi akuntansi di *internet* diungkapkan secara bervariasi mulai dari yang paling sedikit hingga yang paling lengkap (Afryansyah & Haryanto, 2013).

International Accounting Standards Committee (IASC) membagi penggunaan *internet* sebagai saluran penyajian dan pendistribusiian laporan keuangan pada 3 tahapan, yaitu :

- 1) Perusahaan menggunakan *internet* hanya sebagai saluran mendistribusikan laporan keuangan yang telah di cetak dalam format digital, seperti file dengan format pengola kata atau *portable data file*.
- 2) Perusahaan menggunakan *internet* untuk menyajikan laporan keuangan mereka dalam format *web*, yang memungkinkan mesin pencari mengindeks data-data tersebut sehingga mesin pencari dan pengguna dapat dengan mudah mengidentifikasi informasi tersebut.
- 3) Perusahaan menggunakan *internet* dengan maksud menyediakan cara yang lebih interaktif sehingga pengguna tidak hanya melihat laporan baku, namun juga mengkostumisasi sendiri informasi-informasi yang ada dalam laporan keuangan tersebut.

b. Tujuan *Internet Budgeting Reporting*

Pelaporan keuangan melalui internet dapat membantu perusahaan dalam menyebarluaskan informasi mengenai keunggulan-keunggulan perusahaan yang merupakan sinyal positif perusahaan untuk menarik investor. Hal ini dapat diartikan bahwa pelaporan keuangan melalui internet merupakan sarana untuk mengkomunikasikan sinyal positif perusahaan kepada

publik, terutama investor. Praktik ini berkembang pesat dari waktu ke waktu. Perusahaan-perusahaan besar menggunakan *internet* sebagai media alternatif untuk pelaporan keuangan perusahaan. Akan tetapi, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pilihan perusahaan untuk menerapkan atau tidak (Prasetya dan Irwandi, 2012).

Pengungkapan informasi keuangan yang disajikan secara lengkap menunjukkan inisiatif bagi pemerintah daerah untuk lebih transparan dalam pengelolaan pemerintahannya yang akan berujung balasan signal yang baik dari masyarakat yang akan terus mendukung pemerintah untuk terus berkembang dan optimal dalam membangun negara (Nosihana & Yaya, 2016).

Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui *internet*, maka di tahun 2012 Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 188.52/1797/SJ tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Instruksi Mendagri tersebut mewajibkan agar pemerintah Daerah mempublikasikan 12 dokumen pengelolaan anggaran daerah kepada masyarakat di dalam situs resminya.

Dokumen keuangan yang disebutkan dalam instruksi tersebut antara lain (Nosihana & Yaya, 2016):

- 1) Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD)

- 2) Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD)
- 3) Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD)
- 4) Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda Perubahan APBD)
- 5) Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda APBD)
- 6) Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda Perubahan APBD)
- 7) Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD)
- 8) Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD)
- 9) Laporan Realisasi Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (LRA OPD)
- 10) Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (LRA PPKD)
- 11) LKPD yang telah diaudit
- 12) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD.

Publikasi laporan keuangan melalui *internet* merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang dianggap paling efisien, cepat dan murah. Walaupun sudah terdapat Undang-Undang yang mengatur mengenai transparansi mengenai segala informasi dari pemerintah kepada masyarakat salah satunya laporan keuangan, tidak semua Pemda mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap di *website* yang telah tersedia (Nosihana & Yaya, 2016).

c. Pengukuran *Internet Budgeting Reporting*

Internet Budgeting Reporting dalam penelitian ini diukur dengan cara melihat apakah pemerintah daerah yang meliputi kabupaten/kota di pulau Sumatera mempublikasikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) atau tidak mempublikasikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada situs resminya. Pengukuran *internet budgeting reporting* menggunakan angka yang dihitung berdasarkan ketersediaan informasi keuangan sesuai tertuang di dalam ketentuan Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ Tahun 2012 pada situs resmi setiap Pemda di pulau Sumatera.

5. Ukuran Pemerintah Daerah

a. Pengertian Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah Daerah ditandai dengan besarnya aset yang dimiliki suatu daerah. Aset dapat mewakili seberapa besar pemerintahan,

semakin besar aset maka semakin banyak modal yang ditanam (Nosihana & Yaya, 2016). Aset merupakan jumlah sumber daya yang dimiliki suatu entitas untuk melakukan kegiatan operasional entitas tersebut. Aset yang dimiliki juga dapat digunakan untuk pembuatan laporan keuangan entitas tersebut. Semakin besar jumlah aset maka semakin besar sumber daya yang bisa digunakan untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar (Hilmi & Martani, 2012).

Suatu pemerintah daerah yang berukuran besar memiliki jumlah dan transfer kekayaan yang besar pula, sehingga pemerintah daerah akan mendapatkan pengawasan yang lebih besar. Pemerintah daerah yang besar juga lebih kompleks dalam pengelolaan keuangannya, sehingga semakin banyak informasi keuangan yang harus dilaporkan untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran atau memiliki aset yang lebih besar akan memiliki tekanan yang besar pula dari publik untuk menyajikan laporan keuangannya sebagai upaya meningkatkan transparansi dan mengurangi asimetri informasi (Pratama, 2015).

b. Pengukuran Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran Pemerintah Daerah dalam penelitian ini diukur menggunakan rumus $\ln(\text{Total Aset})$ untuk total aset pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Pulau Sumatera. Periode yang dipakai adalah data total aset tahun

2016 dan tahun 2017 karena akan digunakan juga untuk melihat perbandingan total aset selama dua tahun tersebut.

6. Kekayaan Pemerintah Daerah

a. Pengertian Kekayaan Pemerintah Daerah

Kekayaan daerah diasumsikan dengan seberapa besar kinerja pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatannya, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah maupun lain-lain pendapatan yang sah. Pemerintah daerah yang memiliki kekayaan daerah yang tinggi cenderung akan memberikan informasi atas laporan keuangannya secara penuh sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas dan menunjukkan kepada para stakeholdernya bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah menghasilkan kinerja yang tinggi dan telah ikut serta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pula (Ramdhani, 2016).

Kekayaan yang besar cenderung rentan terhadap penyalahgunaan. Hal inilah yang mendorong masyarakat selaku *principal*, menjadi lebih tertarik dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah dan menuntut transparansi atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan kekayaan yang besar menanggung biaya pengawasan yang lebih tinggi dalam memenuhi tuntutan transparansi dari masyarakat. Melalui publikasi laporan keuangan, pemerintah daerah dapat menyampaikan informasi keuangan secara lebih lengkap dengan biaya yang lebih murah, sehingga dapat mengurangi

asimetri informasi yang terjadi antara pemerintah daerah dan masyarakat (Pratama, 2015).

b. Pengukuran Kekayaan Pemerintah Daerah

Kekayaan Pemerintah Daerah dalam penelitian ini diukur menggunakan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Sumatera. Data yang digunakan adalah total Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 dan tahun 2017.

7. Jumlah Penduduk

a. Pengertian Penduduk

Lembaga Badan Pusat Statistik menjabarkan “Penduduk adalah mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulan atau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap.”(www.bps.go.id). Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi (Naopal dkk., 2017).

Pujoalwanto (2014:106) menyatakan bahwa secara umum pertumbuhan penduduk dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

- 1) Pertumbuhan penduduk alami adalah pertumbuhan penduduk yang diketahui dari perhitungan selisih dari jumlah kelahiran dan jumlah kematian.

- 2) Pertumbuhan penduduk migrasi adalah pertumbuhan penduduk yang diketahui dari selisih jumlah migrasi masuk dengan jumlah migrasi keluar.
- 3) Pertumbuhan penduduk total adalah jumlah dari seluruh faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran, kematian migrasi serta emigrasi. Jadi untuk mengetahui pertumbuhan penduduk total adalah dengan cara menambah selisih dari jumlah kelahiran dan kematian dengan selisih jumlah dari imigrasi dengan emigrasi.

b. Pengukuran Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk dalam penelitian ini diukur menggunakan data jumlah penduduk yang tercatat selama 2 tahun pengamatan yaitu jumlah penduduk pada masing-masing kabupaten/kota di Pulau Sumatera pada tahun 2016 dan tahun 2017.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan *internet budgeting reporting* disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Independen (X)	Variabel Dependen (Y)	Hasil Penelitian
1.	Mellisa Prasetya dan Soni Agus Irwandi (2012)	Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Melalui <i>Internet Financial Reporting</i> pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia	Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Umur <i>Listing</i>	(<i>Internet Financial Reporting</i>) (IFR)	Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>internet financial reporting</i> , sedangkan Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Umur <i>Listing</i> tidak mempengaruhi keputusan perusahaan menggunakan IFR
2.	Ariefia Nosihana dan Rizal Yaya (2016)	<i>Internet Financial Reporting</i> dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia	Kompetisi politik, ukuran Pemda, leverage, kekayaan Pemda, tipe Pemda, dan opini audit	<i>Internet financial reporting</i>	Kompetisi politik dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap <i>Internet financial reporting</i> , sedangkan leverage, kekayaan Pemda, tipe Pemda, dan opini audit tidak berpengaruh terhadap <i>Internet financial reporting</i>

3.	Kadek Aris Dwi Pratama (2015)	Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, Dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2010-2013)	Kompleksitas pemerintah daerah, Ukuran pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, dan belanja daerah	Publikasi laporan keuangan pemerintah daerah.	Kompleksitas pemerintah daerah, Ukuran pemerintah daerah, Kekayaan pemerintah daerah dan belanja daerah berpengaruh terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah
4.	Junaedi (2015)	Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah, Ketergantungan Daerah, Kompleksitas, Tipe Pemerintah Daerah, Kualitas Audit dan Tingkat Penyimpangan Anggaran Terhadap Pengungkapan <i>Internet-Based Financial Reporting</i>	Kekayaan daerah, ketergantungan daerah, Kompleksitas daerah, tipe pemerintahan, kualitas audit, dan penyimpangan anggaran	Pengungkapan laporan keuangan di <i>internet</i>	Kekayaan daerah, kompleksitas daerah, tipe pemerintah daerah dan kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan <i>Internet-Based Financial Reporting</i> pemerintah daerah. Sedangkan ketergantungan daerah dan tingkat penyimpangan anggaran tidak berpengaruh terhadap

					pengungkapan <i>Internet-Based Financial Reporting</i> pemerintah daerah
5.	Ririn Hendriyani dan Afrizal Tahar (2015)	Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia	Tingkat ketergantungan, pendapatan asli daerah, belanja modal, jumlah populasi/penduduk dan jumlah temuan audit	Tingkat pengungkapan LKDP	Belanja modal dan jumlah penduduk memberikan efek positif yang signifikan pada tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan dari pemerintah provinsi di Indonesia. Sedangkan Tingkat ketergantungan, pendapatan asli daerah, dan jumlah temuan audit tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan dari pemerintah provinsi di Indonesia
6.	Amiruddin Zul Hilmi dan Dwi Martani (2012)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi	Jumlah kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, jumlah aset, jumlah penduduk, jumlah SKPD, jumlah temuan	Tingkat pengungkapan LKPD provinsi	Jumlah kekayaan daerah, jumlah penduduk dan tingkat penyimpangan berpengaruh terhadap Tingkat pengungkapan

			audit dan tingkat penyimpangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK		LKPD provinsi. Sedangkan tingkat ketergantungan, jumlah aset, jumlah SKPD, jumlah temuan audit berdasarkan pemeriksaan BPK tidak berpengaruh terhadap Tingkat pengungkapan LKPD provinsi
7.	Rahmad Dian Afriansyah dan Haryanto (2013)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di <i>Internet</i> Oleh Pemerintah Daerah	Ukuran (jumlah penduduk), tingkat investasi, kekayaan daerah, kompetisi politik, <i>press visibility</i>	Pengungkapan informasi akuntansi secara sukarela di <i>internet</i>	<i>Press visibility</i> berpengaruh terhadap pengungkapan informasi akuntansi oleh pemerintah daerah. Sedangkan ukuran, tingkat investasi, kekayaan daerah, dan kompetisi politik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi akuntansi oleh pemerintah daerah

C. Hubungan Antar Variabel

Berdasarkan kajian teori dan evaluasi atas penelitian tersebut, maka hubungan variabel dependen dan independen adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap *Internet Budgeting Reporting*

Ukuran pemerintah daerah adalah besarnya jumlah aset yang dimiliki oleh Pemda. Semakin besar aset yang dimiliki suatu daerah menandakan semakin besar juga ukuran Pemda tersebut. Aset dapat mewakili seberapa besar pemerintahan, semakin besar aset maka semakin banyak modal yang ditanam. Maka dari itu ukuran Pemda yang besar mengindikasikan terdapat jumlah kekayaan yang besar pula pengawasan dari masyarakat akan kegiatan pemerintah akan semakin ketat pula karena terdapat kekhawatiran adanya penyelewengan dana yang mungkin saja terjadi. Pemerintah pasti akan berusaha sebisa mungkin mengurangi asimetri informasi keuangan terhadap masyarakat yang mulai beranggapan negatif dengan mempublikasikan laporan keuangannya (Nosihana & Yaya, 2016).

Hidayat dan Isroah (2016) juga menyatakan bahwa nilai dari ukuran perusahaan dapat diperoleh dari total aset perusahaan karena nilai aset cenderung lebih stabil. Rahman, dkk. (2013:10) juga menyatakan besarnya total aset mendorong pemerintah daerah untuk melakukan publikasi LKPD sebagai cara untuk memberikan sinyal bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan kinerja pemerintahan dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetya & Irwandi (2012) menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap

pelaporan melalui internet. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Nosihana & Yaya (2016) menyimpulkan bahwa ukuran Pemda (SIZE) berpengaruh signifikan positif terhadap pelaporan keuangan berbasis *internet* melalui *Egovernment*. Dalam hal ini, ukuran Pemda yang besar mengindikasikan terdapat jumlah kekayaan yang besar pula, sehingga pengawasan dari masyarakat akan kegiatan pemerintah akan semakin ketat pula karena terdapat kekhawatiran adanya penyelewengan dana yang dilakukan pemerintah. Karena adanya pengawasan yang besar maka pemerintah akan cenderung mempublikasikan laporan keuangan melalui *internet* sesuai dengan dengan Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ tentang transparansi pengelolaan anggaran daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan hipotesis pertama adalah sebagai berikut:

H₁: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *internet budgeting reporting*

2. Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap *Internet Budgeting Reporting*

Kekayaan (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (Alvini, 2018). Dengan pendapatan daerah yang besar, pemerintah daerah akan memberikan informasi yang positif dan transparan kepada masyarakat dan menunjukkan kemampuan Daerah dalam memaksimalkan

potensi sumber daya di daerah tersebut. Setyaningrum (2012:158) juga menyatakan bahwa kekayaan (*wealth*) dari pemerintah daerah diproksikan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Halim (2012:101) menjelaskan mengenai Pendapatan Asli Daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan tersebut bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya yang sah.

Kekayaan yang besar cenderung rentan terhadap penyalahgunaan. Hal inilah yang mendorong masyarakat selaku *principal*, menjadi lebih tertarik dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah dan menuntut transparansi atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan kekayaan yang besar menanggung biaya pengawasan yang lebih tinggi dalam memenuhi tuntutan transparansi dari masyarakat. Melalui publikasi laporan keuangan, pemerintah daerah dapat menyampaikan informasi keuangan secara lebih lengkap dengan biaya yang lebih murah, sehingga dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara pemerintah daerah dan masyarakat (Pratama, 2015).

Hasil penelitian Pratama (2015) menunjukkan bahwa kekayaan daerah yang diproksikan dengan pendapatan asli daerah (PAD) pada setiap daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Junaedi (2015) didapatkan

hasil bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan berbasis *internet* pemerintah daerah. Pengaruh positif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kekayaan daerah akan semakin mendorong pemerintah daerah untuk mengungkapkan keuangannya melalui *internet*. Tingkat kekayaan daerah yang tinggi juga bisa dianggap sebagai wujud keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerjanya, hal ini merupakan sinyal positif bagi daerah baik secara ekonomi maupun politik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan hipotesis kedua adalah sebagai berikut:

H₂: Kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *internet budgeting reporting*

3. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap *Internet Budgeting Reporting*

Di Indonesia, jumlah penduduk suatu pemerintah daerah cenderung berbanding lurus dengan tingkat kemajuan teknologi dan informasi pada suatu daerah. Masyarakat yang tinggal di daerah dengan jumlah penduduk yang besar cenderung lebih modern dan banyak mengandalkan *internet* untuk mendapatkan informasi, termasuk informasi tentang kinerja pemerintah daerahnya. Oleh karena itu, cara yang efektif bagi pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi akuntansinya adalah melalui *internet* (Afryansyah & Haryanto, 2013).

Sesuai dengan *Stakeholder Theory*, penduduk merupakan salah satu *Stakeholder* terpenting Pemerintah Daerah. Besarnya jumlah penduduk mencerminkan besarnya kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap daerah. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin besar tuntutan akan pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintahnya mengingat fungsi Pemerintah sebagai abdi masyarakat (Pandansari, 2016). Semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar dorongan dari masyarakat untuk meminta pengungkapan yang lebih besar dalam laporan keuangan pemerintah. Jumlah penduduk merupakan proksi dari kompleksitas pemerintah. Semakin kompleks pemerintahan maka semakin besar pengungkapan yang harus mereka lakukan (Hendriyani & Tahar 2015).

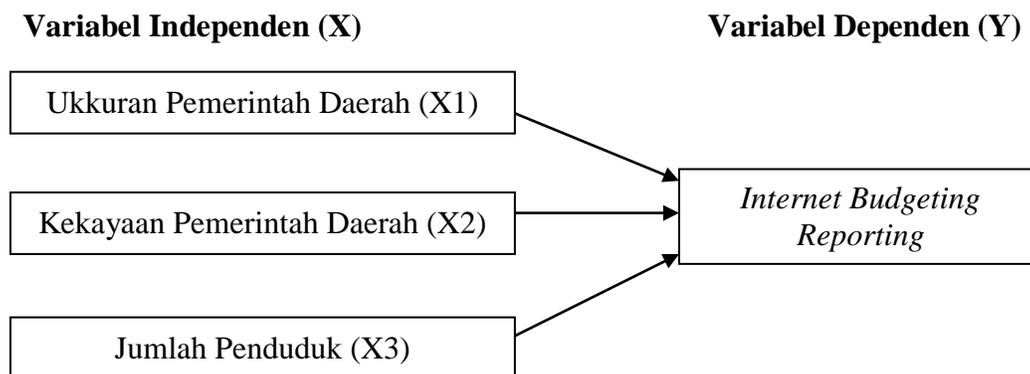
Penelitian yang dilakukan oleh Hendriyani & Tahar (2015) memperoleh kesimpulan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Jumlah penduduk merupakan sebuah pengukuran yang menggambarkan kompleksitas suatu daerah. Artinya semakin tinggi jumlah penduduk suatu daerah maka semakin kompleks pemerintahan tersebut sehingga semakin tinggi pula tingkat pengungkapan informasi yang dilakukan. Pada penelitian lainnya Hilmi & Martani (2012) juga menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Jumlah penduduk merupakan proksi dari

kompleksitas pemerintahan. Kompleksitas ini tidak menghambat tingkat pengungkapan tetapi bahkan meningkatkan tingkat pengungkapan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan hipotesis ketiga adalah sebagai berikut:

H₃: Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap *internet budgeting reporting*

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka konseptual yang menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti, yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *internet budgeting reporting* pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun 2016-2017.
2. Kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap *internet budgeting reporting* pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun 2016-2017.
3. Jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap *internet budgeting reporting* pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera tahun 2016-2017.

B. Implikasi Penelitian

1. Secara teoritis, berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan teori mengenai *internet budgeting reporting*, dimana hasil penelitian ini berkontribusi dalam menambah bukti empiris mengenai pengaruh ukuran pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, dan jumlah penduduk terhadap *internet budgeting reporting*.

2. Secara praktis, bagi pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera diharapkan dapat menambahkan informasi keuangan pada masyarakat dengan mempublikasikan dokumen pengelolaan anggaran pada situs resmi. Pengelolaan anggaran yang lebih baik dan transparan, maka pemerintah Daerah akan dinilai lebih bertanggung jawab terhadap para *stakeholders*.

C. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang terbatas pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Sedangkan praktik E-Government sudah mencakup seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian, hanya terdapat satu variabel yang berpengaruh signifikan terhadap *internet budgeting reporting*.

D. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi variabel lain yang dapat mempengaruhi *internet budgeting reporting* sehingga dapat memprediksi secara lebih akurat. Variabel-variabel lain yang dapat diteliti misalnya tipe pemerintah daerah, kualitas audit, tingkat belanja daerah dan sebagainya

2. Melakukan penelitian dengan topik yang sama tetapi menggunakan sampel yang lebih luas, sehingga diharapkan hasil penelitian selanjutnya dapat digeneralisasi pada seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia maupun seluruh Provinsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ghozali, I. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Kasmir. 2013. Analisis Laporan Keuangan. Edisi Pertama, Cetakan Keenam. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mahmudi. 2016. Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga,. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mulyadi. 2013. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Mursyidi. 2013. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, Cetakan Kedua. Bandung: Refika Aditama.
- Nordiawan, Dedi. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Pujoalwanto, B. 2014. Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris, Cetakan Ke 1. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Cetakan Ke-4. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Jurnal atau Artikel:

- Alvini, Y. 2018. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah Kepada Pemerintah Pusat dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Periode 2011- 2016). *JOM FEB*, Volume 1, Edisi 1, Januari-Juni 2018.

- Afryansyah, R.D. & Haryanto. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet Oleh Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 2, No. 3.
- Cheisviyanny, C., Helmy, H. & Dwita, S. 2018. Analisis Kualitas Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Simposium Nasional Keuangan Negara*. Hal. 1087 – 1104.
- Hendriyani, R. & Tahar, A. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Maret 2015, Vol. 22, No. 1, Hal. 25 – 33.
- Hidayat, Shodiq Nur dan Isroah. 2016. Pengaruh Karakteristik Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan Inflasi Terhadap Return. *Jurnal Profita Edisi 6*.
- Hilmi, A. Z. dan D. Martani. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*.
- Junaedi. 2015. Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah, Ketergantungan Daerah, Kompleksitas, Tipe Pemerintah Daerah, Kualitas Audit dan Tingkat Penyimpangan Anggaran Terhadap Pengungkapan *Internet-Based Financial Reporting*. *Jurnal Sainstech Politeknik Indonusa Surakarta*. Vol. 2 Nomor 4.
- Nosihana, A dan Yaya, R. 2016. *Internet Financial Reporting* dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 3, No. 2, 87-101.
- Pandansari, T. 2016. Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah, dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 19, No. 3.
- Prasetya, M. dan Irwandi, S.A. 2012. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Melalui Internet (*Internet Financial Reporting*) pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *The Indonesian Accounting Review*. Vol. 2, No. 2, 151-158.
- Pratama, K.A.D. 2015. Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2010-2013). *e-Journal Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 3, No. 1.

- Putra, R., Ardhiarisca, O., Wijayanti, R.R., Pratiwi, B.Y. 2018. Evaluasi Perkembangan dan Transparansi Laporan Keuangan *Egovernment* Pemerintah Daerah di Indonesia. *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi 2018*. Yogyakarta, 23-24 Maret 2018.
- Rahman, A., Sutaryo, dan Budiarmanto, A. 2013. Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVI*, Manado.
- Ramdhani, D. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Propinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, Vol.9, No.2, hal. 146-160.
- Setyaningrum, Dyah. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol.9 Nomor 2. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Trisnawati, Mya Dewi, dan Achmad, Komarudin. 2014. Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Internet. *Jurnal Brawijaya*. Vol.2, Nomor 2.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Instruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan *Pendayagunaan Telematika* di Indonesia.

Situs:

https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_page=41

www.kemendagri.go.id.

www.bpk.go.id